



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8637-8644
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Manajemen Pemerintahan Desa dalam Upaya Menjaga Fasilitas Sosial di Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri

Endah Pratiwi Khusnul Qotimah^{1✉}, Evi Priyanti²,

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 1910631180010@student.unsika.ac.id[✉]

Abstrak

Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia sering terjadi pada suatu wilayah perkotaan, semakin besar pertumbuhan dan jumlah penduduk tentu harus diikuti dengan penambahan berbagai fasilitas sosial yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sekitarnya. Di Kabupaten Bogor memiliki laju pertumbuhan penduduk relatif meningkat, bertambahnya jumlah penduduk maka ketersediaan fasilitas sosial juga harus memenuhi kebutuhan penduduk yang ada. Fenomena diatas menunjukkan bahwa adanya penyimpangan pada Sistem Pemerintahan Desa dalam upaya menjaga fasilitas sosial. Penulis memiliki hipotesa bahwa permasalahan ini terdapat pada fungsi manajemen yang tidak berjalan dengan semestinya yaitu fungsi Perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai " Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Upaya Menjaga Fasilitas Sosial Di Desa Karanggan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jawa Barat". Permasalahan yang dikaji merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis, oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Dari semua fungsi tersebut bisa disimpulkan bahwa fasilitas sosial perlu diperhatikan kembali oleh masyarakat desa karena masih ada beberapa warga yang tidak ikut serta dalam menjalankan gotong royong serta masih ada beberapa warga yang belum memiliki kesadaran dalam arti penting menjaga fasilitas sosial demi terjaganya kenyamanan serta kentrertraman di Desa Karanggan.

Kata kunci: *Manajemen Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Karanggan*

Abstract

Indonesia's huge population growth often occurs in urban areas, with increasing growth and increasing population should certainly be followed by the increasing social facilities needed to support the lives of its neighbors. Bogor said the increase in population growth was relatively high in bogor county, so the availability of social facilities would also be needed. The above shows there has been a deviation in the village's governance system in the effort to maintain social facilities. The writer has a working hypothesis that the problem exists in faulty management functions that function of design, organization, direction and supervision are not working properly. Based on the above description, the writer was interested in raising the title of "the system of village government in the leadership of the village chief in efforts to maintain social facilities in the karanggan village in district bogor. West Java ". The problem assessed is a social and dynamic one, so researchers choose to use qualitative research methods to determine how to find, collect, process and analyze the data generated by the study. All these functions may conclude that the system must be reconsidered by village people as some have not Shared in cooperation and some have yet to be aware of the importance of maintaining social facilities in order to maintain comfort and reassurance in the karanggan village.

Keywords: *Government Management, Social Faccilities, Karanggan*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia sering terjadi pada suatu wilayah perkotaan, semakin besar pertumbuhan dan jumlah penduduk tentu harus diikuti dengan penambahan berbagai fasilitas sosial yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sekitarnya. Di Kabupaten Bogor memiliki laju pertumbuhan penduduk relatif meningkat, bertambahnya jumlah penduduk maka ketersediaan fasilitas sosial juga harus memenuhi kebutuhan penduduk yang ada. Kabupaten Bogor memiliki luas 296,8 Km² dan terdiri dari 416 desa dan 19 Kelurahan yang terletak di Kecamatan Cibinong yang berada disebelah utara Kota Bogor, salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bogor adalah Desa Karanggan, yang terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Kecamatan Gunung Putri merupakan kecamatan yang memiliki 10 Desa salah satunya Desa Karanggan.

Desa Karanggan termasuk kedalam kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yaitu Kepala Desa, Desa Karanggan masyarakatnya sudah cukup mengenal teknologi, akan tetapi kegiatan mereka pun masih cukup bergantung pada Alam sekitar seperti masih adanya Perternakan ikan, ayam, bebek dan sebagainya. Masih kentalnya tradisi di dalam kehidupan masyarakat Desa Karanggan dengan tradisi- tradisi peninggalan leluhur,yang berhubungan dengan siklus kehidupan (hamil-lahir,dewasa, berumah tangga, meninggal),seperti upacara kelahiran, pernikahan, khitanan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian.

Nilai Kearifan lokal dan Adat istiadat masih di lestarikan, sehingga kebiasaan bergotong-royong masih sering dilakukan dalam beberapa aktifitas masyarakat. Juga masih menjadi kebiasaan dan

membudaya di kalangan masyarakat seperti menjenguk tetangga yang sakit, terkena musibah, membantu bersama-sama dalam acara hajatan perkawinan dan sebagainya. Kita tahu bahwa Kota adalah Wilayah yang luas yang biasanya lebih diperhatikan oleh Pemerintah..

Dalam berbagai Aspek terlihat banyak sekali ketimpangan misalnya saja dalam Pengelolaan fasilitas sosial nya, Kota lebih maju dan bahkan sangat maju dalam berbagai bidang seperti pembangunan, pelayanan sosial, kesehatan dan ekonomi, namun masyarakat desa masih banyak yang mengalami kemiskinan. Pembangunan dikatakan kurang jika suatu Desa memiliki fasilitas sosial yang kurang memadai. Setiap desa masih sangat kental dengan kegiatan tradisionalnya, tetapi jauh berbeda dengan Desa Karanggan yang sekarang sudah memasuki masyarakat modern, Perkembangan pembangunan terus berjalan sampai sekarang, banyak faktor yang mempengaruhi Desa karanggan bisa mengalami Perubahan yang relatif cepat, itu karena desa ini tidak jauh dari Kota, tepatnya ditengah-tengah Kecamatan Cibinong dan Depok. Fenomena diatas menunjukkan bahwa adanya penyimpangan pada Sistem Pemerintahan Desa dalam upaya menjaga fasilitas sosial. Penulis memiliki hipotesa bahwa permasalahan ini terdapat pada fungsi manajemen yang tidak berjalan dengan semestinya yaitu fungsi Perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai " Manajemen Pemerintahan Dalam Upaya Menjaga Fasilitas Sosial Di Desa Karanggan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jawa Barat".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka dan wawancara, karena masalah yang diteliti merupakan masalah yang memerlukan analisis historis. Analisis historis ini dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Yang memfokuskan pada tools of analysis fungsi manajemen pemerintahan yang terdiri dari empat unsur variabel yaitu (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pengarahan (4) Pengawasan.

Setelah data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis dengan Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data, dan menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, diinterpretasikan dengan teknik analisis historis kualitatif, yakni mengkaji secara mendalam mengenai Sistem Pemerintahan Desa Dalam Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Upaya Menjaga Fasilitas Sosial di Kecamatan Gunungputri Desa Karanggan Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa karanggan, Kabupaten Bogor. Tepatnya kami melakukan penelitian mengenai Upaya Menjaga Fasilitas Sosial di Desa Karanggan. Kajian ini menjelaskan dan mengguraikan intepretasi penelitian dari hasil analisis data-data dan informasi yang kami peroleh saat melakukan Penelitian dan wawancara dengan Kepala Desa Karanggan. Yang memfokuskan pada

Fungsi Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari empat unsur variabel yaitu (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pengarahan (4) Pengawasan.

A. Perencanaan (Planning)

Perencanaan Kepala Desa Karanggan dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial Di Desa. Perencanaan yaitu : dasar pemikiran dari suatu tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Sedangkan merencanakan memiliki arti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan dengan matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau lembaga. Perencanaan harus mampu menyesuaikan dengan keadaan baik itu terhadap kebutuhan-kebutuhan, memprediksi apa yang mungkin saja dapat terjadi. dimana terjadi hal-hal yang tiba-tiba tidak sesuai dengan rencana baik untuk saat ini ataupun untuk masa yang akan datang harus ada perkiraan atau analisis yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi pemerjelas dari tahap-tahap yang dikehendaki atau diinginkan. Hal ini merujuk pada Perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Karanggan dengan mendatangi undangan-undangan hari besar Islam yang bertujuan untuk memberikan sambutan-sambutan yang lebih mengutamakan kelegalitasan Mushola, wakaf Masjid, dan wakaf Majelis Ta'lim serta bertujuan untuk menjaga sarana prasarana dan bila mana ada sarana yang memerlukan bantuan untuk diperbaiki maka Kepala Desa lebih menyambungkan ke tingkat-tingkat terakait. Hasil penemuan Peneliti dilapangan mengenai perencanaan Pelayanan Sosial di Desa Karanggan. Kepala Desa sudah mempunyai Perencanaan dan langkah-langkah atau strategi dalam menjaga fasilitas sosial yang ada di Desa Karanggan.

B. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian oleh Kepala Desa Karanggan dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai Proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan yang berkaitan erat dengan fungsi Perencanaan, karena Pengorganisasian juga perlu adanya perencanaan atau direncanakan. Dalam bahasa inggris disebut organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga adanya keterikatan antara satu sama lain terhadap hubungan secara keseluruhan. Pengorganisasian dan organisasi merupakan sesuatu yang berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen sedangkan organisasi adalah alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas ataupun bagian-bagian pekerjaann kepada setiap staf atau pekerja, penetapan dapertemen-dapertemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan. Berdasarkan Penelitian yang telah kami lakukan, untuk saat ini pengorganisasian dalam menjaga fasilitas sosial di Desa Karanggan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembagian tugas, karena bukan hanya Kepala desa saja, tetapi sekertaris desa, staf kelurahan, KASI (Kepala Seksi), KESRA (Kabag Kesejahteraan Rakyat), RT/RW, dan Tokoh-tokoh masyarakat turut ikut dalam menjaga fasilitas sosial. Masing-masing lembaga memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan. yang dimana dari mulai perencanaan dari bawah ke atas. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dibahas melalui lebangnya dari warga masyarakat yang melalui himbauan Kepala Desa dalam

sambutan-sambutan. Dimana hal ini mencerminkan bahwa tugas masyarakat adalah memberikan masukan-masukan dan ide-ide kepada Kepala desa melalui RT/RW sebagai mitra Kerja Pemerintah Desa. Jika ada fasilitas sosial yang rusak maka Kepala Desa meminta legalitas kepada pihak terkait untuk mendata legalitas yang menjadi wakaf Masjid, Mushola, dan Majelis Ta'lim yang harus diurus terlebih dahulu dan bila ada kerusakan yang ringan maka akan diswadayakan melalui KAS yang ada dan melalui ja'maah sekitar. Namun jika terdapat kerusakan yang berat maka dibantu dengan melalui program-program yang ada seperti di Bupati dengan kelegalitasan yang lengkap. Dengan program-program tersebut perbaikan bangunan-bangunan prasarana di Desa Karanggan sudah berjalan dengan baik. Dan dalam hal ini Kepala Desa menyatakan bahwa fasilitas sosial yang ada di Desa Karanggan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa seperti bangunan Mushola yang tiap RT sudah tersedia.

C. Pengarahan (Actuating)

Pengarahan oleh Kepala Desa dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial Di Desa Karanggan. Pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan organisasi atau instansi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh Sumber daya dalam pemerintahan yang ada di dalam organisasi atau instansi agar pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan dan direncanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang sesuai. Hasil wawancara penelitian saya kepada Kepala Desa dilapangan. Kepala Desa mengatakan bahwa yang paling utama beliau terjun langsung dalam memberikan sambutan-sambutan mengenai pentingnya menjaga fasilitas sosial. Kemudian Kepala Desa memberikan arahan kepada bawahannya hampir sebulan sekali sesuai dengan kebutuhan mereka dalam Staf Pemerintahan, beliau langsung memberikan arahan kepada KASI atau KESRA untuk terjun kelapangan dalam memantau kekompakan dan kerukunan melalui DKM dalam menggerakkan ja'maah untuk melaksanakan gotong royong di hari libur dan hal tersebut dilakukan rutin setiap bulannya.

D. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan oleh Kepala Desa dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial Sosial di desa Karanggan. Fungsi pengawasan itu sendiri adalah fungsi terakhir dari proses manajemen, fungsi ini begitu sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan. Pengawasan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan manajemen sudah berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan tujuan atau tidak. Jika tidak atau ada yang perlu dikoreksi maka harus ada evaluasi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Disini peranan Kepala Desa Karanggan dalam menjaga fasilitas sosial adalah dengan memberikan pengawasan melalui KESRA yang terjun langsung kelapangan untuk mendata dan agar fasilitas sosial tetap terjaga serta untuk mentoring sarana prasarana yang memerlukan bantuan dalam merenovasi. KESRA sebagai pengawas langsung dalam mendata dan memberikan bantuan kepada fasilitas sosial yang sudah rusak. Hal ini dilakukan secara efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana yang telah dibuat bersama kepala desa berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam pengawasan Fasilitas Sosial di Desa Karanggen Kepala desa sudah memberikan penjelasan mengenai hal ini kepada saya sebagai peneliti melalui wawancara. Dalam pengawasan beliau mengatakan bahwa beliau memberikan himbauan atau sambutan kepada masyarakat desa yang menjadi wadah dalam penyampaian aspirasi warga dalam pentingnya menjaga fasilitas sosial. Namun yang sebenarnya diwajibkan dalam controlling adalah KESRA. Hasil penelitian selanjutnya dibahas dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian pada topik serupa dari peneliti sebelumnya untuk mengungkap keajegannya (konsistensinya) apakah konsisten (sama) atau berbeda, lalu jelaskan alasan ilmiahnya atas hasil dimaksud secara lugas dan tuntas sehingga memperjelas posisi hasil penelitiannya. Selanjutnya, temuan hasil penelitian diungkapkan disertai kelebihan dan kelemahannya, jika ada. Ungkapan temuan hasil penelitian ini akan mempermudah dalam menyimpulkan hasil penelitian.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan pada Fungsi Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari empat unsur variabel yaitu (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pengarahan (4) Pengawasan. 1) Perencanaan (Planning) Kepala Desa Karanggen dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial Di Desa. Perencanaan yaitu : dasar pemikiran dari suatu tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Sedangkan merencanakan memiliki arti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan dengan matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi atau lembaga. 2) Pengorganisasian (organizing) oleh Kepala Desa Karanggen dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai Proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan yang berkaitan erat dengan fungsi Perencanaan, karena Pengorganisasian juga perlu adanya perencanaan atau direncanakan. Dalam bahasa Inggris disebut organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga adanya keterikatan antara satu sama lain terhadap hubungan secara keseluruhan. Pengorganisasian dan organisasi merupakan sesuatu yang berbeda. 3) Pengarahan (Actuating) oleh Kepala Desa dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial Di Desa Karanggen. Pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan organisasi atau instansi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh Sumber daya dalam pemerintahan yang ada di dalam organisasi atau instansi agar pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan dan direncanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang sesuai. Hasil wawancara penelitian saya kepada Kepala Desa dilampirkan. 4) Pengawasan (Controlling) oleh Kepala Desa dalam Upaya menjaga Fasilitas Sosial Sosial di desa Karanggen. Fungsi pengawasan itu sendiri adalah fungsi terakhir dari proses manajemen, fungsi ini begitu sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan. Pengawasan memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan manajemen sudah berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan tujuan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Cita, 2020. Manajemen Pemerintahan, Gorontalo: Suryahdi Haji Insani.
- Suryahadi, Haji Insani, 2015. Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Timbal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015, Indonesia: Suryahdi Haji Insani.
- Michael Rinaldi, 2019. Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas Sosial Di Kota Kotamabago, Volume 6, Nomor 2, Indonesia: Michael Rinaldi
- Adam, Mukhairil Bachtiar. 2012. Sistem Informasi Geografis Pemetaan Fasilitas Umum Di Kabupaten Sumedang Berbasis Volume 1, Nomor 2, Indonesia: Adam Mukhairil Bachtiar.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta:
- Graha Ilmu. Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dessler, Gery. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara .
- Manulang, M. 1996. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Masry Simbolon Maringan. 2004. Dasar- dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moelong. Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
- Rosdakarya. Nawawi, Hadari. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta : UGM Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru). Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.
- Sinabela, Poltak. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja Yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, Eko dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Tangkilisan, Hegel Nogi. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik Konsep, Aplikasi Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: CV. Mandar Maju
- Tripven. Konsep Kepemimpinan. Diakses 17 Desember 2020 dari <https://karangganbersatu.com/>
- Bumdes. Bumdes Karanggan Bersatu. Diakses 28 Desember 2021 dari <https://www.tripven.com/konsep-kepemimpinan/>

